



**PEMERINTAH
PROVINSI BALI**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2023**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**BANGGA
BERWISATA
INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan perlunya penyempurnaan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali Tahun 2023 ini menunjukkan tingkat capaian yang baik dimana capaian untuk tujuan dan sasaran strategis telah memenuhi sasaran yang ditetapkan. Laporan ini merupakan prestasi capaian kinerja yang akan menjadi catatan bagi pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat lebih memberikan manfaat kepada masyarakat maupun para pihak yang berkepentingan.

Bali, Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan Perekonomian
Drs. I Ketut Adiarsa, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641231 198603 1 263



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4 Struktur Organisasi	3
1.5 Sumber Daya	4
1.5.1 Kondisi Sumber Daya Manusia	4
1.5.2 Sarana dan Prasarana Kerja	5
1.6 Sistematika LKJIP	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Strategi Kebijakan	7
2.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023	7
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2023	8
2.4 Instrumen Pendukung	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	11
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	12
3.2.1 Evaluasi.....	12
3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023	15
3.2.3 Informasi Tambahan Terkait Capaian Kinerja Tahun 2023	23
3.3 Akuntabilitas Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	28
4.1 Kesimpulan	28
4.2 Saran/Rekomendasi	29



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	1.1	: Kondisi SDM Berdasarkan Status/Jenjang Jabatan	4
Tabel	1.2	: Kondisi SDM Berdasarkan Gender, Pendidikan dan Kepangkatan	5
Tabel	1.3	: Data Aset	6
Tabel	2.1	: Strategi dan Kebijakan	7
Tabel	2.2	: Program dan Anggaran	7
Tabel	2.3	: Rencana Kinerja Tahun 2023	8
Tabel	3.1	: Skala Nilai Peringkat Kinerja	11
Tabel	3.2	: Capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali Tahun 2023	11
Tabel	3.3	: Evaluasi Kinerja Biro PBJEK Tahun 2023	12
Tabel	3.4	: Persentase proses pemilihan pengadaan barang/jasa	15
		yang tepat waktu, biaya, kualitas dan layanan	
Tabel	3.5	: Persentase strategi pengadaan barang/jasa yang	15
		sesuai dengan regulasi pengadaan barang/jasa	
Tabel	3.6	: Persentase pengelolaan katalog lokal	15
Tabel	3.7	: Tingkat kematangan UKPBJ	16
Tabel	3.8	: Persentase keterisian jabatan fungsional	17
		pengelola pengadaan barang/jasa terhadap formasi yang sudah mendapat rekomendasi	
Tabel	3.9	: Persentase pembinaan dan pengembangan	17
		keahlian/kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa	
Tabel	3.10	: Persentase rata-rata bimbingan teknis, pendampingan	17
		dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	
Tabel	3.11	: Persentase fasilitasi pendampingan hukum bagi pelaku ...	18
		pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi	
Tabel	3.12	: Jumlah OPD yang melakukan input RUP tepat waktu	18
Tabel	3.13	: Persentase pengadaan barang/jasa melalui e- procurement ..	18
Tabel	3.14	: Persentase penyelesaian paket melalui e-kontrak	19
Tabel	3.15	: Persentase penyelesaian permasalahan	19
		penggunaan SPSE	
Tabel	3.16	: Persentase pengelolaan infrastruktur layanan	19
		pengadaan barang/jasa secara elektronik	
Tabel	3.17	: Jumlah pengembangan sistem informasi pendukung	19
		UKPBJ	
Tabel	3.18	: Persentase akurasi informasi kepada pengguna	20
		layanan pengadaan barang/jasa internal dan eksternal	
Tabel	3.19	: Jumlah pelaporan transaksi pengadaan barang/jasa	20
Tabel	3.20	: Persentase pelaksanaan pemantauan bersama	20
		pelaksanaan kontrak paket strategis	
Tabel	3.21	: Persentase fasilitas layanan administrasi umum	20
		dan kepegawaian	
Tabel	3.22	: Persentase pelaporan akuntabilitas keuangan dan	21
		kinerja tepat waktu	



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Tabel	3.23	: Persentase penyelenggaraan perumusan rancangan perencanaan kelembagaan dan ketatalaksanaan (IKU, RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, LkjIP, LKPJ dan LPPD)	21
Tabel	3.24	: Persentase pengendalian keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi	21
Tabel	3.25	: Persentase Penyerapan KUR sesuai dengan Target	22
Tabel	3.26	: Persentase pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan energi	22
Tabel	3.27	: Persentase pengendalian, koordinasi BUMD dan BLUD	22
Tabel	3.28	: Persentase pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunandaerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	22
Tabel	3.29	: Persentase progress pelaporan pelaksanaan pembangunan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	23
Tabel	3.30	: Realisasi Belanja Langsung menurut Sasaran dan Indikator tahun 2023	27



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali	3
2.1 : Gambar Tampilan Halamam Muka SPSE	9
2.2 : Aplikasi SiAngsa	9
2.3 : Gambar Tampilan Halaman Muda SiBaper	10
2.4 : Gambar Tampilan Halaman Muka Siput	10
2.5 : Gambar Tampilan Halaman Muka Arca	10
3.1 : Hasil Pengisian Penilaian Mandiri Kematangan Lembaga UKPBJ Provinsi Bali pada Aplikasi SiUKPBJ	16
3.2 : Capaian MCP Korsupgah Provinsi Bali	23
3.3 : Capaian Stranas PK Provinsi Bali	24
3.4 : Capaian Tingkat Kematangan Lembaga UKPBJ Provinsi Bali	25
3.5 : Piagam Apresiasi KPK	26



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*) yang ditetapkan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya LKjIP Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Mendorong Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa yang kredibel sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Bahan evaluasi dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Untuk melaksanakan hal tersebut Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali melaksanakan 4 (empat) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Sasaran Penyusunan LKjIP adalah sebagai laporan kegiatan Biro Pengadaan Barang/jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali berupa pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2020 – 2023 dan Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Tahun 2023 serta DPA Tahun Anggaran 2023 selanjutnya dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

1.2 Dasar Hukum

LKjIP disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- c. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara melalui SK Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berada di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali melaksanakan Fungsi Penunjang di bidang Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Pembangunan.

Lebih lanjut dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat



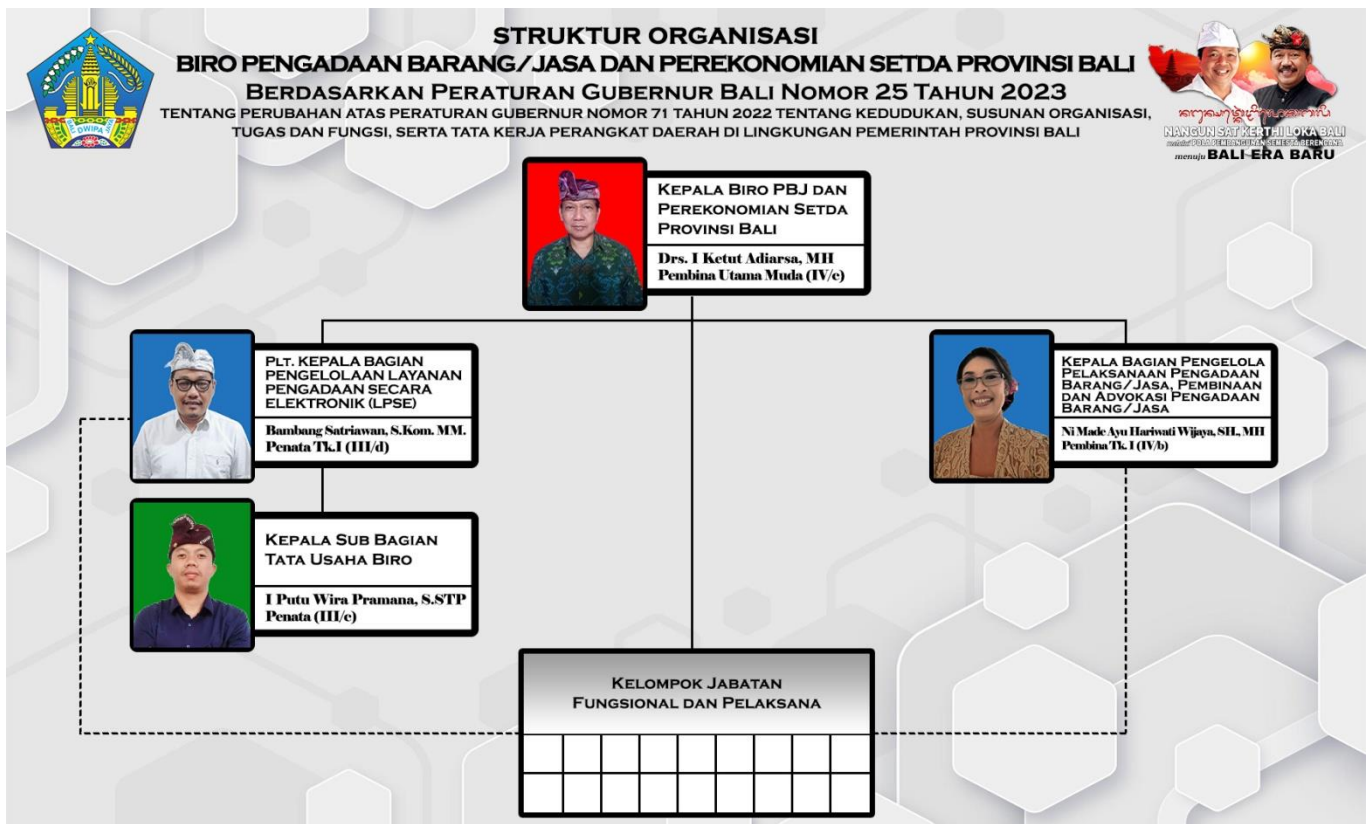
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mempunyai tugas pokok diantaranya:

- Melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- Melaksanakan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali berdasarkan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri dari 2 (dua) Bagian dan 1 (satu) Unit Substansi, yaitu: Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Bagian Pengelola Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa serta Unit Substansi Perekonomian dan Pembangunan. Bagian/Unit Substansi di Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali dibagi lagi menjadi Sub Bagian/Sub Koordinator dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali



Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian, yang membawahi :

1. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Unit Substansi LPSE; dan
 - c. Unit Substansi Pengelola Sistem Informasi dan Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Bagian Pengelola Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahi :
 - a. Unit Substansi Strategi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Unit Substansi Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Unit Substansi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
3. Unit Substansi Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - a. Unit Substansi Ekonomi Makro, Ekonomi Mikro, dan Sumber Daya Alam ;
 - b. Unit Substansi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - c. Unit Substansi Administrasi Pembangunan Daerah.

1.5 Sumber Daya

Sumber daya yang tergambar dalam laporan ini terdiri dari kondisi sumber daya manusia yaitu individu yang bertindak sebagai penggerak bagi organisasi dan perusahaan, dan bertindak sebagai aset yang memerlukan pelatihan dan pengembangan keterampilan serta kondisi sarana dan prasarana kerja yang menggambarkan kondisi peralatan dan perlengkapan penunjang yang digunakan sebagai alat bantu dalam mencapai tujuan organisasi.

1.5.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia merupakan unsur yang terpenting didalam organisasi, Kondisi SDM di Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian sebanyak 111 (seratus sebelas) orang yang dikelompokkan berdasarkan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Berdasarkan Status/Jenjang Jabatan

No	Keterangan	Jumlah
1	Pejabat Eselon II	1 orang
2	Pejabat Eselon III	2 orang
3	Pejabat Eselon IV	1 orang
4	Pelaksana	25 orang
5	Fungsional	41 orang
6	CPNS	-
7	Tenaga Honorer	-
8	Tenaga Harian	-
9	Tenaga Non ASN	34 orang
Jumlah		104 orang

Sumber : Sub bagian Tata Usaha Biro PBJEK Setda Provinsi Bali, Tahun 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Tabel 1.2
Berdasarkan Gender, Pendidikan dan Kepangkatan

Gol	Laki - Laki							Perempuan						
	S3	S2	S1	D3	SMA	SD	JML	S3	S2	S1	D3	SMA	SD	JML
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
IV/b	-	2	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1
IV/a	1	2	1	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	3
Jml. Gol. IV	1	5	2	0	0	0	8	0	4	0	0	0	0	4
III/d	-	6	6	-	-	-	12	-	2	4	-	-	-	6
III/c	-	1	5	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	0
III/b	-	-	3	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	3
III/a	-	-	12	-	2	-	14	-	-	10	-	1	-	11
Jml. Gol. III	0	7	26	0	2	0	35	0	2	17	0	1	0	20
II/d	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jml. Gol. II	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Jml. Gol. I (I/d)	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Non ASN	0	0	14	0	3	0	17	0	2	12	0	3	0	17
Jumlah Total	1	12	42	0	9	1	65	0	8	29	0	4	0	41

Sumber : Sub bagian Tata Usaha Biro PBJEK Setda Provinsi Bali, Tahun 2023

Jumlah pegawai per bagian sebagai berikut :

- Kepala Biro sebanyak 1 orang.
- Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebanyak 27 orang.
- Bagian Pengelola Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 54 orang.
- Unit Substansi Perekonomian dan Pembangunan sebanyak 23 orang.

1.5.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Berdasarkan Buku Inventaris Tahun 2023 (audited), dapat diperoleh data aset sebagai berikut. Jumlah barang milik daerah yang ada di Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali dengan total nilai sebesar Rp.9.301.006.003,78 dalam kondisi baik masih dapat dipergunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 1.3
Data Aset

Aset	Saldo Awal (Posisi per 1 Januari 2023)		Mutasi dari Januari s/d Desember 2023		
	Volume	Nilai (Rp)	Bertambah	berkurang	Saldo per 30 Desember 2023
Tanah	-	-	-	-	-
Peralatan dan mesin	933	8.487.863.867,78	263.428.136,00	-	8.751.292.003,78
Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
Jalan, Jaringan	-	-	-	-	-
Aset Tetap lainnya	-	-	-	-	-
Aset tak berwujud	5	549.714.000	-	-	549.714.000
Total	938	9.037.577.867,78	263.428.136,00	-	9.301.006.003,78

Sumber : Sub bagian Tata Usaha Biro PBJEK Setda Provinsi Bali, Tahun 2023

1.6 Sistematika LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan sistematika mendasar sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali.

Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen perjanjian kinerja).

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Strategi Kebijakan

Strategi kebijakan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali Tahun 2023, tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Strategi dan Kebijakan

Strategi	Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali minimal baik dalam menunjang visi, misi dan program pemerintah Provinsi Bali	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kompetensi SDM dan kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang menghasilkan value for money
	2. Prosentase Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE)
Terwujudnya perekonomian Bali yang berdaya saing dan berkelanjutan serta meningkatkan tertib administrasi pembangunan	Persentase rata-rata kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

2.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali TA 2023, tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Kegiatan	Lokasi	Pagu Anggaran APBD (Rp)	Pagu Anggaran APBDP (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Denpasar	2.980.568.132	2.972.755.364
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pununjang Urusan Pemerintah Daerah	Denpasar		
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Denpasar	629.076.000	627.688.000
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Denpasar		
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Denpasar		



No	Program/ Kegiatan	Kegiatan	Lokasi	Pagu Anggaran APBD (Rp)	Pagu Anggaran APBDP (Rp)
3	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Denpasar	12.426.645.000	3.725.179.000
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Denpasar		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa	Denpasar		
4	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Denpasar	75.060.000	73.660.000
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Denpasar		
TOTAL				16.111.349.132	7.399.282.364

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2023

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali mengacu pada Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Rata-rata Pemanfaatan Sistem PBJ (SIRUP, E-Tendering/E-Seleksi, E-Purchasing, Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing, E-Kontrak) - Persentase Keterisian Jabatan Fungsional PBJ terhadap Formasi yang sudah Mendapatkan Rekomendasi - Tingkat Kematangan Lembaga UKPBJ - Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (Ketepatan waktu, biaya, kualitas dan layanan) 	<p style="text-align: center;">90 %</p> <p style="text-align: center;">70 %</p> <p style="text-align: center;">Level 4 (strategis)</p> <p style="text-align: center;">90 %</p>
2	Terwujudnya Perekonomian Bali yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan serta Meningkatkan Tertib Administrasi Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian 	90 %

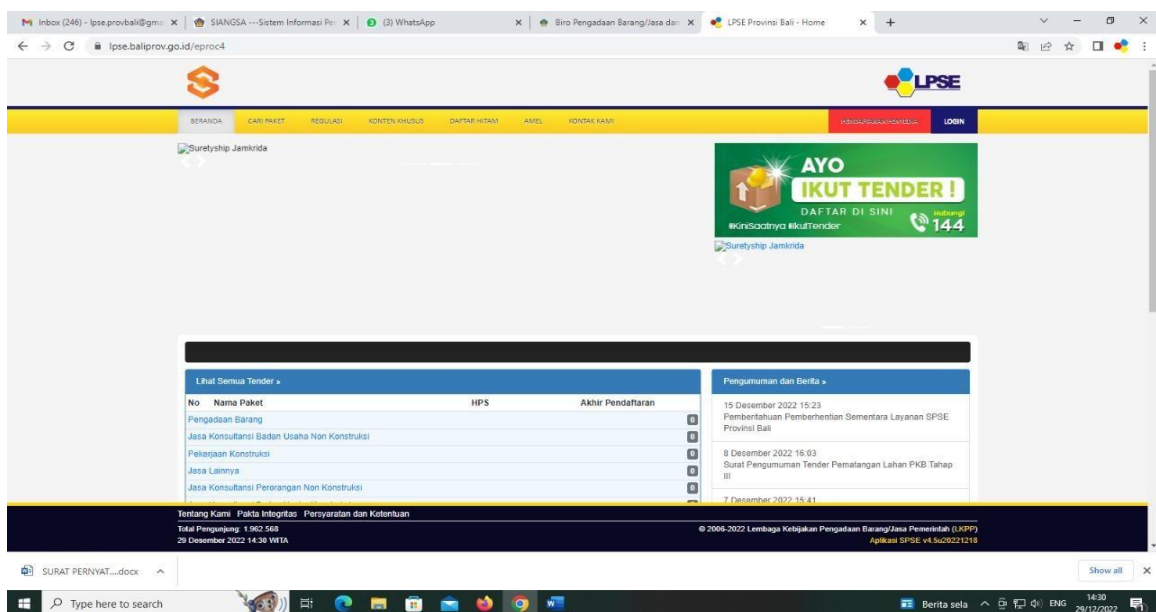


2.4 Instrumen Pendukung

Dalam merealisasikan program/kegiatannya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah memerlukan perangkat pendukung yang diharapkan dapat membantu mencapai sasaran atas kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, untuk mendukung akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan informasi publik.

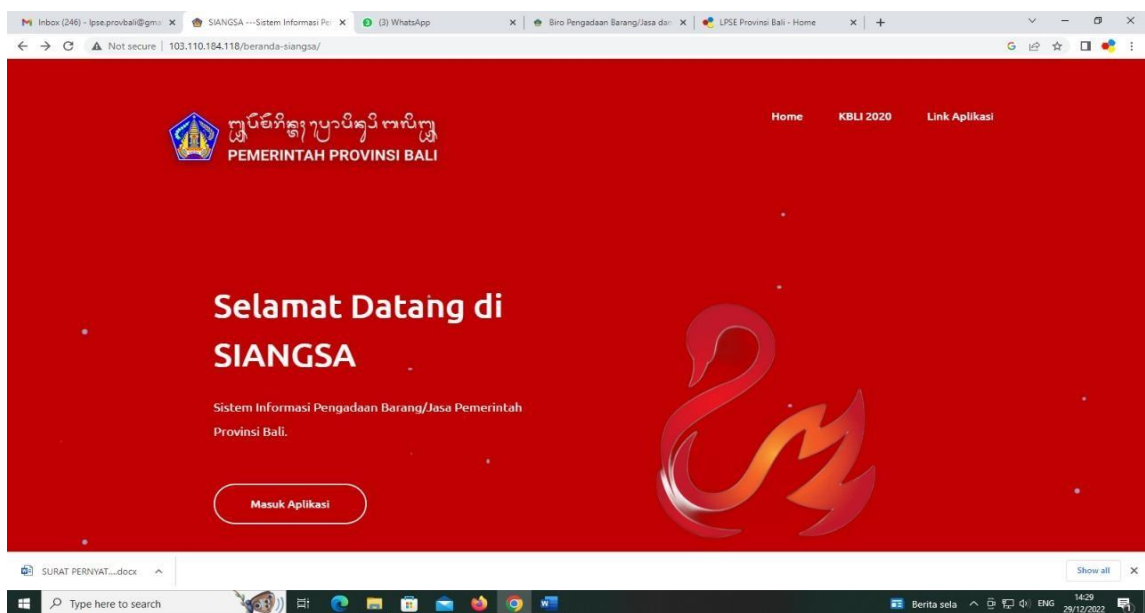
Untuk maksud efisien dan efektif dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa maka Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali telah dilengkapi instrument pendukung antara lain Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SiAngsa), Sistem Informasi Barang Persediaan (SiBaper), Sistem Informasi RUP Terinput (Siput), dan Aplikasi Rekap Catalog (Arca).

Gambar 2.1
Gambar Tampilan Halaman Muka SPSE



www.lpse.baliprov.go.id

Gambar 2.2
Aplikasi SiAngsa



www.siangsa.baliprov.go.id



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



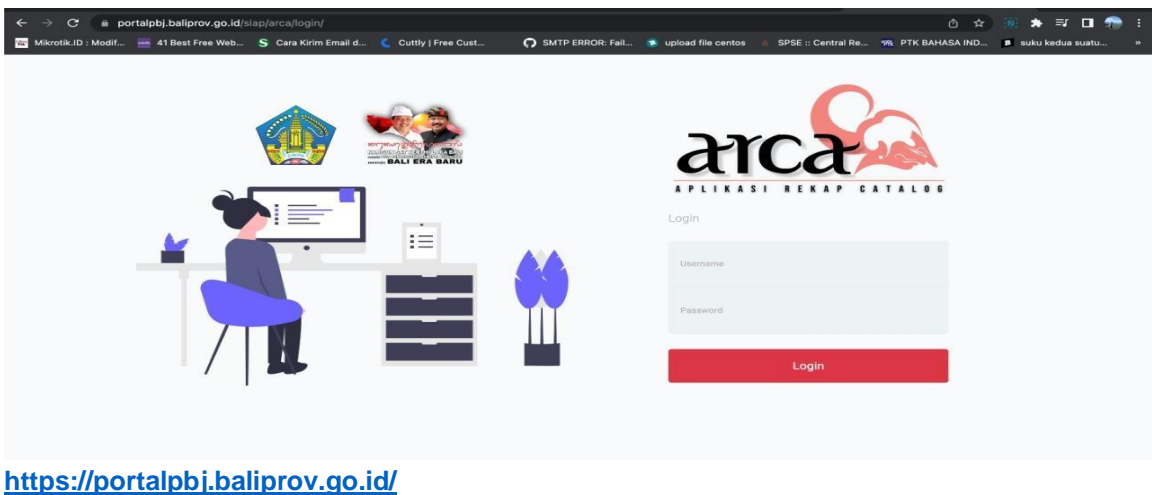
Gambar 2.3
Gambar Tampilan Halaman Muka SiBaper



Gambar 2.4
Gambar Tampilan Halaman Muka Siput



Gambar 2.5
Gambar Tampilan Halaman Muka Arca



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	A
2.	76 ≤ 90	Tinggi	B
3.	66 ≤ 75	Sedang	C
4.	51 ≤ 65	Rendah	D
5.	≤ 50	Sangat Rendah	E

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria	Kode
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali minimal baik dalam menunjang visi, misi dan program Pemerintah Provinsi Bali	1. Persentase Keterisian Jabatan Jabatan Fungsional PBJ terhadap formasi yang sudah mendapatkan rekomendasi	%	66	76,09	115,28	Sangat Baik	A
		2. Persentase kompetensi SDM PBJ (PPK, Pokja, PP)	%	57	66,67	116,96	Sangat Baik	A
		3. Tingkat kematangan lembaga UKPBJ	level	4 (strategis)	3 (proaktif)	90	Sangat Baik	A
		4. Persentase bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa dan penggunaan seluruh system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang terfasilitasi	%	100	100	100	Sangat Baik	A



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria	Kode
		5. Persentase rata-rata capaian kinerja pengadaan barang/jasa (ketepatan waktu, biaya, kualitas dan layanan)	%	100	98,08	98,08	Sangat Baik	A
2.	Terwujudnya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang mudah, cepat, transparan, akuntabel dan terintegrasi	1. Persentase pengelolaan sistem dan infrastruktur layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang transparan dan akuntabel	%	75	99	132	Sangat Baik	A
		2. Persentase jumlah pengembangan sistem informasi pengadaan yang handal dan mendukung seluruh aktivitas pengadaan	%	75	100	133,33	Sangat Baik	A
		3. Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan paket strategis PBJ	%	70	86,26	123,23	Sangat Baik	A
		4. Persentase layanan perencanaan, pengelolaan keuangan serta administrasi umum dan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	Sangat Baik	A
3.	Terwujudnya Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.	1. Persentase Pengendalian Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	%	100	100	100	Sangat Baik	A
		2. Persentase Pengendalian Tata Kelola dan Pelayanan BUMD dan BLUD	%	100	95,35	95,35	Sangat Baik	A
		3. Persentase Pengendalian dan progress Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	Sangat Baik	A

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Evaluasi

Tabel. 3.3
Evaluasi Kinerja Biro PBJEK Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali minimal baik dalam menunjang visi, misi dan program Pemerintah Provinsi Bali	1.1 Persentase proses pemilihan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu, biaya, kualitas dan layanan	%	100	98,08	98,08
		1.2 Persentase strategi PBJ yang sesuai dengan regulasi PBJ	%	70	100	142,86
		1.3 Persentase pengelolaan Katalog Lokal	%	100	100	100



No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	
		1.4	Tingkat kematangan lembaga UKPBJ	level	3 (proaktif)	3 (proaktif)	100
		1.5	Persentase keterisian jabatan Fungsional PBJ terhadap formasi yang sudah mendapatkan rekomendasi	%	66	76,09	115,28
		1.6	Persentase pembinaan dan pengembangan keahlian/kompetensi SDM pengadaan barang/jasa	%	100	100	100
		1.7	Persentase rata-rata bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	%	100	100	100
		1.8	Persentase fasilitasi pendampingan hukum bagi pelaku pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi	%	100	100	100
Total rata-rata capaian sasaran 1							107,03
2	Terwujudnya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang mudah, cepat, transparan, akuntabel dan terintegrasi	2.1	Jumlah OPD yang melakukan input SIRUP tepat waktu	OPD	36	36	100
		2.2	Persentase PBJ melalui e-procurement	%	80	100	125
		2.3	Persentase penyelesaian paket melalui e-kontrak	%	60	0	0
		2.4	Persentase penyelesaian permasalahan penggunaan SPSE	%	50	100	200
		2.5	Persentase pengelolaan infrastruktur layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	%	90	99	110
		2.6	Jumlah pengembangan sistem informasi pendukung UKPBJ	SIM	1	1	100
		2.7	Persentase akurasi informasi kepada pengguna layanan PBJ internal dan eksternal	%	90	100	111,11
		2.8	Jumlah pelaporan transaksi PBJ	Bulan	12	12	100
		2.9	Persentase pelaksanaan pemantauan bersama pelaksanaan kontrak paket strategis	%	70	100	142,86
		2.10	Persentase fasilitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	%	100	100	100
		2.11	Persentase pelaporan akuntabilitas keuangan dan kinerja tepat waktu	%	100	100	100
		2.12	Persentase penyelenggaraan perumusan rancangan perencanaan kelembagaan dan	%	100	100	100



No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
		ketatalaksanaan (IKU, RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, LkIP, LKPJ dan LPPD)				
Rata-rata capaian sasaran 2						107,41
3	Terselenggaranya fasilitasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan daerah sesuai ketentuan	3.1	Persentase pengendalian keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi	%	100	100
		3.2	Persentase Penyerapan KUR sesuai dengan Target	%	100	100
		3.3	Persentase pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan energi	%	100	100
		3.4	Persentase pengendalian, koordinasi BUMD dan BLUD	%	100	95,35
		3.5	Persentase pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	100	100
		3.6	Persentase progress pelaporan pelaksanaan pembangunan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	%	100	100
Rata-rata capaian sasaran 3						99,23
TOTAL PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN SASARAN 1 S/D 3						104,56

Rata-rata capaian indikator kinerja tujuan strategis dan sasaran strategis Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 105,08 %. Indikator kinerja yang tidak mencapai sasaran yang ditetapkan adalah :

- a. Terwujudnya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang mudah, cepat, transparan, akuntabel dan terintegrasi. Pada persentase penyelesaian paket melalui e-kontrak terealisasi sebesar 0 % dari target sebesar 60 %, dikarenakan fitur e-kontrak belum diterapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Disamping itu, integrasi dengan para stakeholder juga belum disosialisasikan dengan optimal. Penerapan e-kontrak direncanakan dilaksanakan pada Tahun 2023.
- b. Terselenggaranya fasilitasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan daerah sesuai ketentuan. Pada persentase pengendalian, koordinasi BUMD dan BLUD tersealisasi sebesar 95,35 % dari target 100 %. Hal ini disebabkan monitoring dan pembinaan teknis terhadap BUMD belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan personil.



3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali berupaya melaksanakan amanat tugas penunjang pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali dibidang pengadaan barang/jasa melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan capaian kinerja tujuan strategis tahun 2022 sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a. **Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali minimal baik dalam menunjang visi, misi dan program Pemerintah Provinsi Bali.**

Tabel 3.4

Indikator a.1

Persentase proses pemilihan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu, biaya, kualitas dan layanan

Satuan	2021	2022		2023		Sasaran Akhir Renstra 2023	Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) persen	100	100	100	100	98,08	100	99,36

Terdapat paket pekerjaan yang batal diproses karena waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak mencukupi dan ketidaksesuaian persyaratan teknis lainnya sehingga anggaran dialokasikan kembali di tahun 2023.

Tabel 3.5

Indikator a.2

Persentase strategi pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan regulasi pengadaan barang/jasa

Satuan	2021	2022		2023		Sasaran Akhir Renstra 2023	Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) persen	56,04	70	70	70	70	70	61,52

Masih terdapat pengadaan barang/jasa yang mengalami perubahan perencanaan pada saat realisasi, hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi dan ketentuan pengadaan barang/jasa itu sendiri seperti contoh : berkembangnya komoditas katalog lokal.

Tabel 3.6

Indikator a.3

Persentase pengelolaan katalog lokal

Satuan	2020	2021		2022		Sasaran Akhir Renstra 2023	Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) persen	100	100	100	100	100	100	100

Pada Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Bali telah dilaksanakan 2 kali sosialisasi etalase produk yang telah tayang dan 11 kali *Focus Group Discussion (FGD)* penambahan etalase produk. Sampai dengan Desember 2022 sudah tayang sebanyak 43 etalase produk.



Tabel 3.7
Indikator a.4
Tingkat kematangan UKPBJ

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	3	3	3	4	3	3

Tingkat Kematangan UKPBJ :

Level 1 (Inisiasi)	Pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih adhoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ)
Level 2 (Esensi)	Memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, namun masih tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses pengadaan barang/jasa yang aktif
Level 3 (Proaktif)	Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal
Level 4 (Strategis)	Proses/pola pikir pengelolaan inovatif yang terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi
Level 5 (Unggul)	Penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya

Sampai dengan Desember 2023, dari sembilan variabel 6 variabel sudah berada pada Level 4 (Strategis) dan 3 variabel berada pada Level 3 (Proaktif). Tahun 2022 dan 2023 dioptimalkan kembali terkait implementasi kematangan lembaga UKPBJ Level 3 (Proaktif).

Gambar 3.1
Hasil Pengisian Penilaian Mandiri Kematangan Lembaga UKPBJ
Provinsi Bali pada Aplikasi SiUKPBJ

Pengisian Penilaian Mandiri - UKPBJ PROVINSI BALI Home • Pengisian Penilaian Mandiri

CSV Excel PDF Print
Search:

No	Domain	Variabel	Level	Status	Aksi
1)	Proses	Manajemen Pengadaan	Strategis	Menunggu Verifikasi	i Lihat
2)	Proses	Manajemen Penyedia	Strategis	Terverifikasi	Perbarui
3)	Proses	Manajemen Kinerja	Strategis	Terverifikasi	Perbarui
4)	Proses	Manajemen Risiko	Strategis	Menunggu Verifikasi	i Lihat
5)	Kelembagaan	Pengorganisasian Kelembagaan	Strategis	Terverifikasi	Perbarui
6)	Kelembagaan	Tugas/Fungsi Kelembagaan	Strategis	Terverifikasi	Perbarui
7)	SDM	Perencanaan SDM Pengadaan	Strategis	Terverifikasi	Perbarui
8)	SDM	Pengembangan SDM Pengadaan	Strategis	Terverifikasi	Perbarui
9)	Sistem Informasi	Sistem Informasi	Strategis	Menunggu Verifikasi	i Lihat

Showing 1 to 9 of 9 entries



Tabel 3.8

Indikator a.5

Persentase keterisian jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa terhadap formasi yang sudah mendapat rekomendasi

Satuan	2021	2022		2023		Sasaran Akhir Renstra 2023	Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
(%) persen	50	50	51,60	66	76,09	80	59,23

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan rekomendasi di tahun 2022 adalah sebanyak 46 formasi. Sampai dengan Desember 2022 sudah terisi sebanyak 35 formasi atau sebesar 76,09%.

Tabel 3.9

Indikator a.6

Persentase pembinaan dan pengembangan keahlian/kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	100	100	100	100	100	100

Pelaksanaan kegiatan pelatihan/bintek/pembinaan/sosialisasi dalam rangka kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :

No	Kegiatan	Sasaran	Volume	Tempat	Waktu	Biaya
1	Rapat Konsultasi terkait dengan proses tahapan mulai dari Reviu sampai evaluasi khususnya Paket Pekerjaan "Konsultasi"	Pokja Pemilihan Biro PBJEK Provinsi Bali, Jafung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Biro PBJEK, Pokja Pemilihan Kab. Bangli	25 orang	Ruang Rapat Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali	Senin, 18 September 2023	APBD
2	Pelatihan ketepatan proses belanja pada katalog elektronik dengan Tata Cara Belanja Melalui e-Purchasing mempergunakan Mini Kompetisi	Pokja Pemilihan Biro PBJEK Provinsi Bali, Jafung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Biro PBJEK, ASN bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar	50 orang	Ruang Rapat Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali dan melalui Zoom Meeting	Rabu, 27 September 2023	APBD

Tabel 3.10

Indikator a.7

Persentase rata-rata bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	100	100	100	100	100	100

Bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses



pengadaan barang/jasa dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion (FGD)*, Media NGOPPI, pendampingan langsung ke perangkat daerah maupun konsultasi stakeholder di UKPBJ.

Tabel 3.11

Indikator a.8

Persentase fasilitasi pendampingan hukum bagi pelaku pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	100	100	100	100	100	100

Permasalahan hukum pengadaan barang/jasa di tahun 2023 berupa : 3 sengkahan, 2 permasalahan hukum, 2 pendampingan/konsultasi *Tim Clearing House* dan 10 permohonan pendampingan/konsultasi pelaksanaan tahapan pengadaan barang/jasa. Semua kegiatan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa dimaksud telah terfasilitasi proses pendampingan.

b. Terwujudnya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang mudah, cepat, transparan, akuntabel dan terintegrasi.

Tabel 3.12

Indikator b.1

Jumlah OPD yang melakukan input RUP tepat waktu

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	36	36	36	36	36	36

Pendampingan OPD dalam penginputan RUP pada Aplikasi SiRUP per-Desember 2022 sudah sesuai dengan dokumen anggaran dan terealisasi sebesar 36 OPD yang sudah melakukan penginputan RUP.

Tabel 3.13

Indikator b.2

Persentase pengadaan barang/jasa melalui e-procurement

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	100	80	100	80	100	100

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, telah difasilitasi melalui e-procurement yaitu melalui e-purchasing (katalog nasional, lokal dan sektoral), Toko Daring/Bela Pengadaan dan SPSE.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Tabel 3.14
Indikator b.3
Persentase penyelesaian paket melalui e-kontrak

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	0	70	0	70	89,53	29,84

Fitur e-kontrak telah diterapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Serta integrasi dengan para stakeholder (seperti BKPAD Provinsi Bali selaku perangkat daerah pengelola keuangan daerah) telah dikoordinasikan dengan optimal.

Tabel 3.15
Indikator b.4
Persentase penyelesaian permasalahan penggunaan SPSE

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	100	100	100	100	100	100

Permasalahan terkait penggunaan SPSE difasilitasi oleh LPSE Provinsi Bali dan LKPP RI selaku lembaga pembina pengadaan barang/jasa. Sampai Desember 2023, semua permasalahan dapat diselesaikan oleh Tim LPSE Provinsi Bali. Terdapat permasalahan penggunaan SPSE yang diteruskan penanganannya ke LKPP RI yaitu terkait adanya hack oleh oknum tak bertanggungjawab terhadap beberapa akun Pokja Pemilihan.

Tabel 3.16
Indikator b.5
Persentase pengelolaan infrastruktur layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik

Satuan	2021	2021		2022		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	99	90	99	90	99	99

Target terhadap pengelolaan infrastruktur layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik tidak 100 % sekalipun capaian sudah 99 % dikarenakan masih ada kemungkinan terhadap permasalahan yang di luar kendali dan perencanaan penanganan.

Tabel 3.17
Indikator b.6
Jumlah pengembangan sistem informasi pendukung UKPBJ

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
SIM	1	1	1	1	1	1

Target sasaran pengembangan sistem informasi pendukung UKPBJ di tahun 2023 terealisasi 1 SIM (100%) adalah pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa (SiAngsa) dalam mendukung kinerja UKPBJ.



Tabel 3.18

Indikator b.7

Persentase akurasi informasi kepada pengguna layanan pengadaan barang/jasa internal dan eksternal

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	100	90	100	90	100	100

Informasi penggunaan layanan pengadaan barang/jasa baik internal maupun eksternal disampaikan melalui sistem informasi terkait (SPSE), website, email dan akun media social.

Tabel 3.19

Indikator b.8

Jumlah pelaporan transaksi pengadaan barang/jasa

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
Bulan	12	12	12	12	12	12

Pelaporan transaksi pengadaan barang/jasa dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kontrak dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Tahun 2023, pelaporan sudah dilaksanakan sampai dengan Bulan Desember 2023.

Tabel 3.20

Indikator b.9

Persentase pelaksanaan pemantauan bersama pelaksanaan kontrak paket strategis

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	100	70	100	70	100	100

Pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Pemantauan paket strategis dalam pelaksanaan pekerjaan untuk menghindari potensi permasalahan dan kontrak kritis.

Tabel 3.21

Indikator b.10

Persentase fasilitas layanan administrasi umum dan kepegawaian

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	100	100	100	100	100	100

Pelayanan administrasi kepegawaian diselenggarakan 1 (satu) tahun mulai dari Bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023. Seluruh permohonan telah diproses dengan capaian 100%.



Tabel 3.22

Indikator b.11

Persentase pelaporan akuntabilitas keuangan dan kinerja tepat waktu

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	100	100	100	100	100	100

Laporan pengelolaan keuangan disusun sesuai dengan periodiknya sampai dengan tahun 2023 semua laporan sudah tersusun tepat waktu dengan terealisasi sebesar 100%.

Tabel 3.23

Indikator b.12

Persentase penyelenggaraan perumusan rancangan perencanaan kelembagaan dan ketatalaksanaan (IKU, RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, LkjiP, LKPJ dan LPPD)

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	100	100	100	100	100	100

Penyelenggaraan perumusan rancangan perencanaan kelembagaan dan ketatalaksanaan terlaksana dengan baik. Penyelenggaraan perumusan rancangan perencanaan kelembagaan dan ketatalaksanaan (IKU, RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, LkjiP, LKPJ dan LPPD) sampai dengan akhir tahun 2023 sudah terealisasi 100%.

c. Terselenggaranya fasilitasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan daerah sesuai ketentuan.

Tabel 3.24

Indikator c.1

Persentase pengendalian keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	-	100	100	100	100	100

Pengendalian keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi dilaksanakan melalui monitoring ke lapangan dan koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Perluasan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan stakeholder terkait, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak terkait lainnya.



Tabel 3.25
Indikator c.2
Persentase Penyerapan KUR sesuai dengan Target

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	-	100	100	100	100	100

Sampai dengan Desember Tahun 2023, fasilitasi pengordinasian penyerapan KUR dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan telah terfasilitasi dengan baik.

Tabel 3.26
Indikator c.3
Persentase pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan energi

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	-	100	100	100	100	100

Sampai dengan Desember Tahun 2023, pengkoordinasian perumusan kebijakan dibidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan air telah terselenggara dengan baik.

Tabel 3.27
Indikator c.4
Persentase pengendalian, koordinasi BUMD dan BLUD

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	-	100	93,35	100	43	-

Fasilitasi pengendalian dan pelayanan koordinasi bagi BUMD dan BLUD telah terselenggara dengan baik. Hanya saja, fungsi pembinaan terhadap BUMD masih belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan personil pelaksana teknis.

Tabel 3.28
Indikator c.5
Persentase pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	-	100	100	100	100	100

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini telah dilakukan sebanyak 20 (dua puluh satu) kali, diantaranya 15 Kegiatan yang dilakukan secara monitoring sedangkan 5 kegiatan sisanya yaitu lanjutan atau evaluasi pekerjaan dilapangan. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada bulan Juli 2023, yang perencanaanya sampai bulan Oktober 2023 yang dilaksanakan dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Bali.



Tabel 3.29
Indikator c.6

Persentase progress pelaporan pelaksanaan pembangunan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu

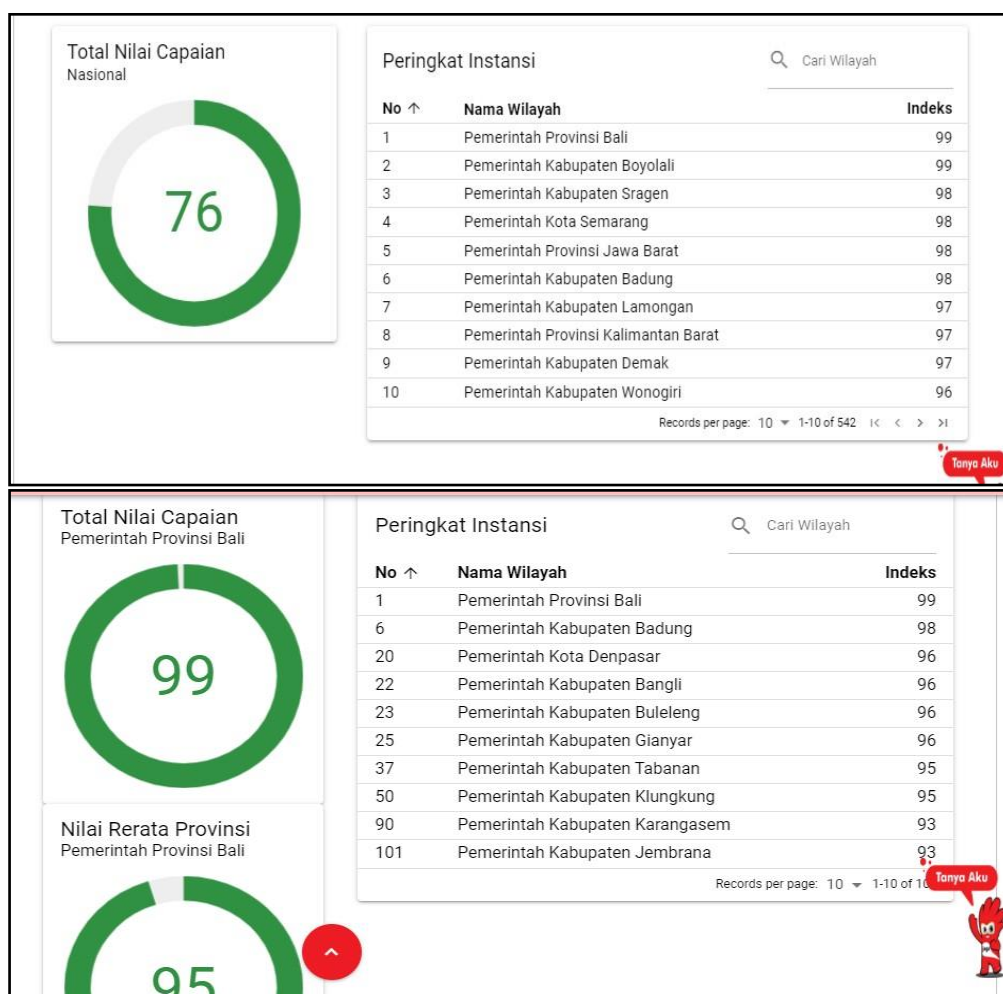
Satuan	2021	2022		2023		Rata-Rata Capaian Akhir Renstra
	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(%) persen	-	100	100	100	100	100

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini telah dilakukan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, diantaranya 15 Kegiatan yang dilakukan secara monitoring sedangkan 6 kegiatan sisanya yaitu lanjutan atau evaluasi pekerjaan dilapangan. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada bulan Agustus 2023, yang perencanaanya sampai bulan Nopember 2023 yang dilaksanakan dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Bal

3.2.3 Informasi Tambahan Terkait Capaian Kinerja Tahun 2023

a. Capaian Nilai MCP Korsupgah

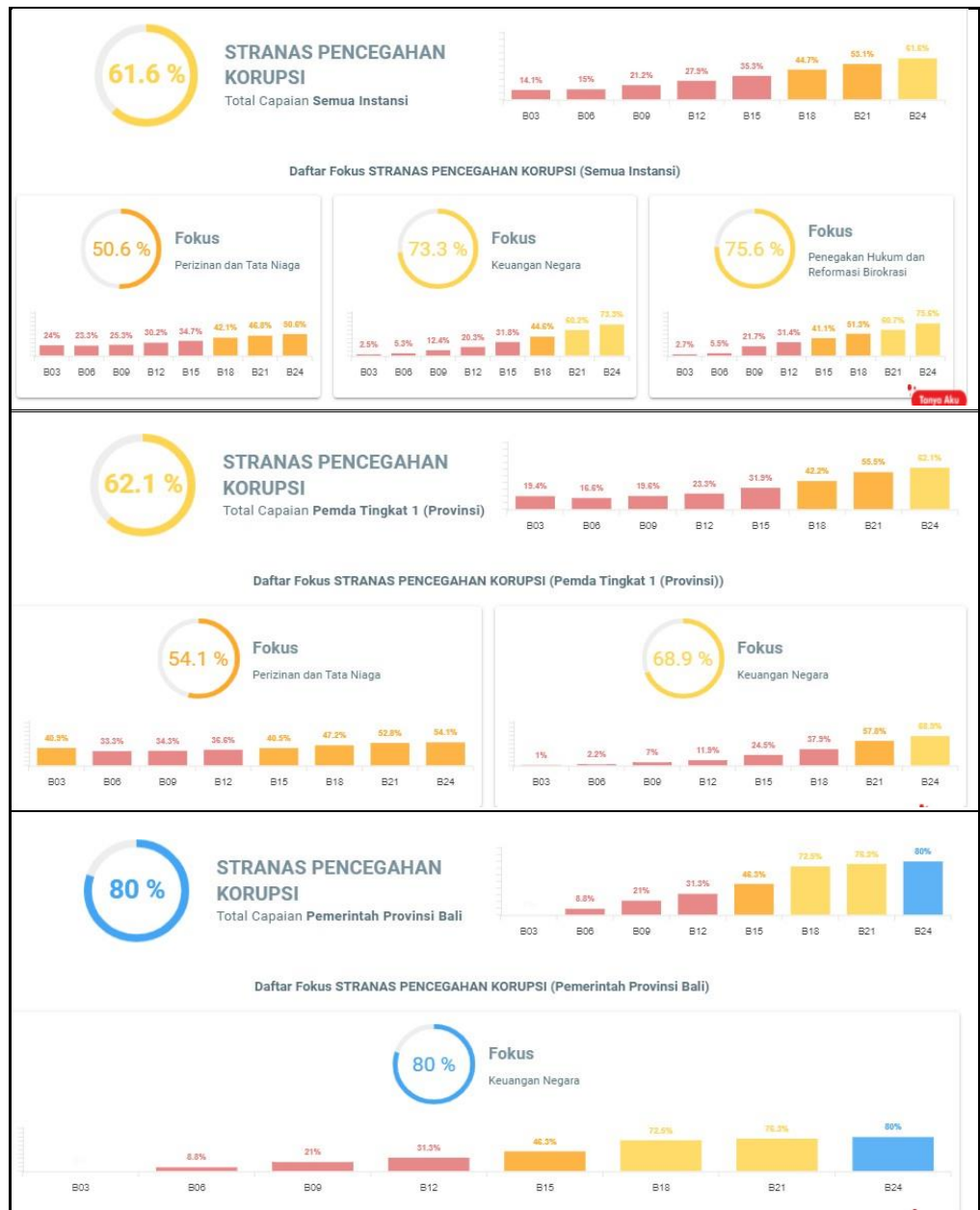
Gambar 3.2
Capaian MCP Korsupgah Provinsi Bali





b. Capaian Nilai Stranas PK

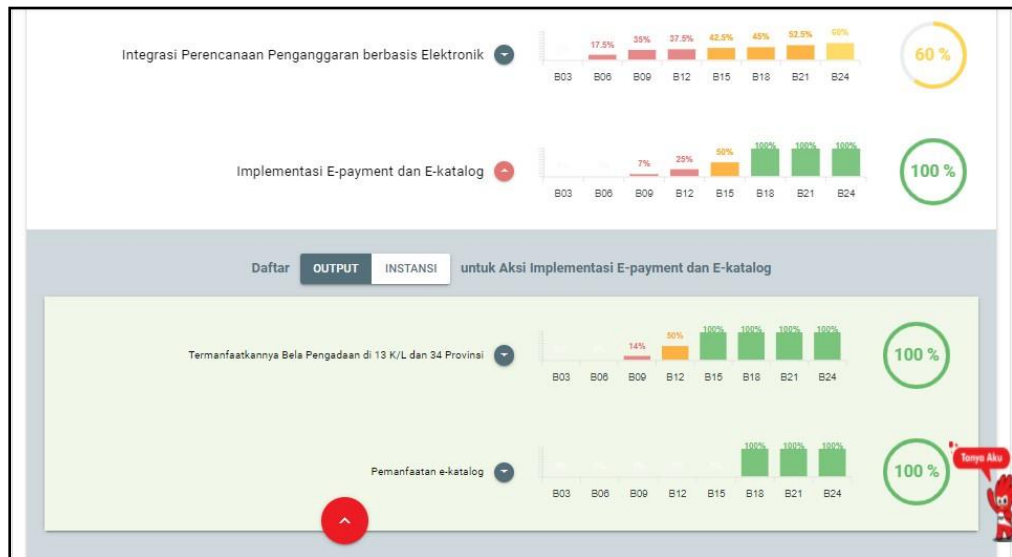
Gambar 3.3
Capaian Stranas PK Provinsi Bali



Balai Sertifikasi Elektronik

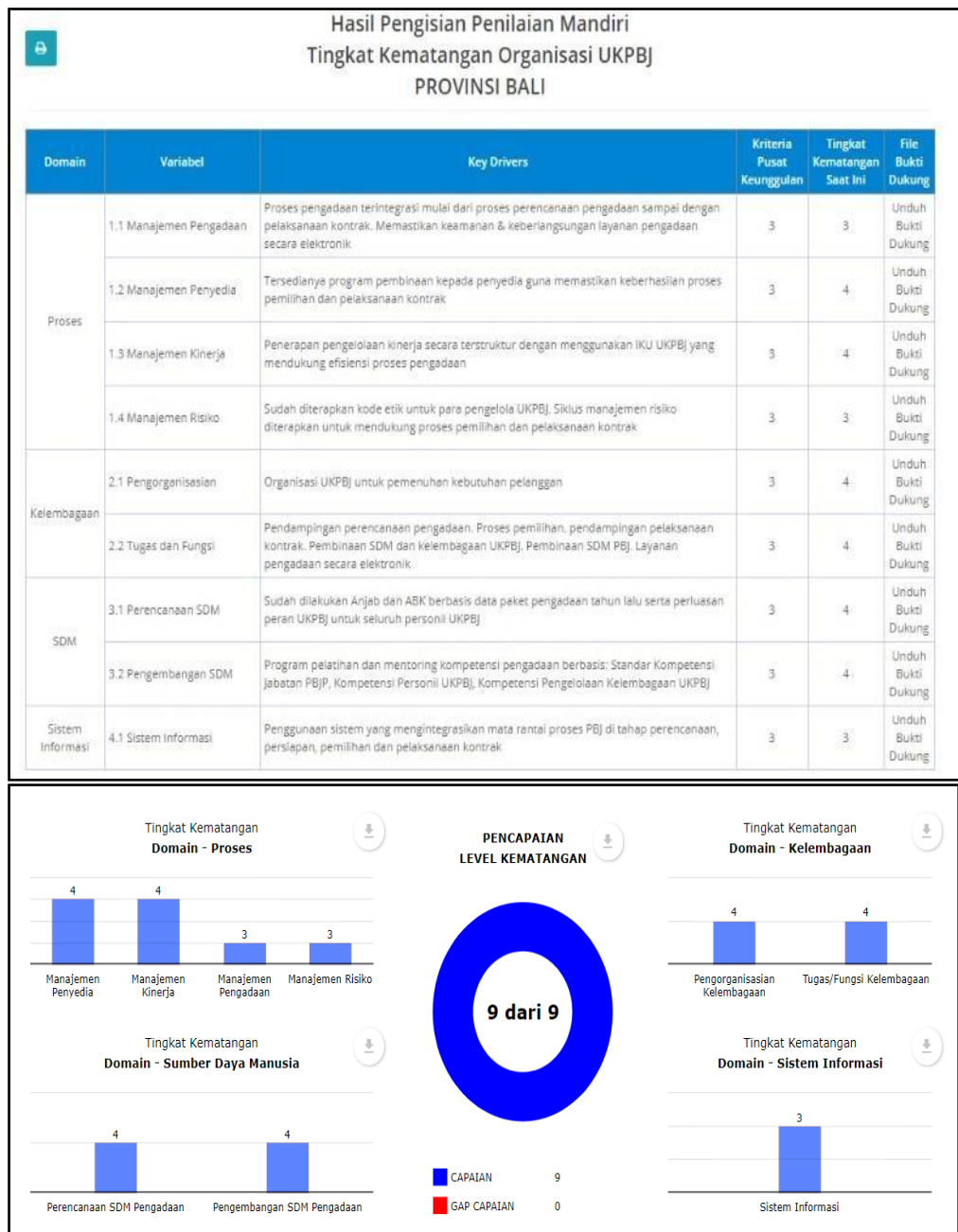
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





c. Kematangan Lembaga UKPBJ

Gambar 3.4
Capaian Tingkat Kematangan Lembaga UKPBJ Provinsi Bali



- d. Apresiasi Atas Komitmen dan Kontribusi Dalam Pelaksanaan Aksi Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik (Implementasi Katalog Lokal) Tahun 2021 – 2022

Gambar 3.5
Piagam Apresiasi KPK



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3.3 Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Belanja Langsung Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.7.399.282.364,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.718.489.520,00 atau 77,09%. Realisasi Belanja Langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran dan indikator disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Realisasi Belanja Langsung menurut Sasaran dan Indikator tahun 2023

No.	Program / Kegiatan	Anggaran Induk (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
	Belanja Langsung				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.	2.980.568.132	2.972.755.364	2.507.259.554	84,32
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.500.000	13.500.000	10.584.000	78,40
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.364.018.532	2.364.565.764	2.130.111.525	90,06
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	603.049.600	594.689.600	366.564.029	61,62
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	629.076.000	627.688.000	481.981.642	76,64
1	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	74.814.000	74.814.000	47.369.304	63,32
2	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	482.510.000	481.654.000	404.223.490	83,78
3	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	71.752.000	71.220.000	30.388.848	42,35
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	12.426.654.000	3.725.179.000	2.713.552.974	72,51
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	11.989.783.000	3.338.447.000	2.589.550.317	77,57
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	99.608.000	99.598.000	41.165.150	41,33
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa	337.254.000	287.134.000	82.837.507	24,56
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	75.060.000	73.660.000	15.695.350	20,88
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	25.100.000	24.780.000	2.428.250	9,67
2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.960.000	48.880.000	13.267.100	26,56
J U M L A H		16.111.349.132	7.399.282.364	5.718.489.520	77,09



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang merupakan perubahan dari Renstra Tahun 2020 – 2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali) Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
2. Capaian kinerja untuk tujuan strategis dan sasaran strategis ini sangat baik dengan rata-rata capaian 104,56 % dengan kinerja anggaran sebesar Rp.5.766.270.311,00 atau sebesar 46,83 %. Rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh Belanja Subsidi Transportasi yang direncanakan untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng direalisasikan sesuai kebutuhan.
3. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali melalui tugas dan fungsinya pada Tahun 2023 telah berhasil mendorong Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa dengan prinsip *value for money* yang menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran belanja pengadaan barang/jasa sebesar Rp. 113.687.153.426,00 atau 12,98 % berdasarkan perbandingan pagu anggaran dengan nilai kontrak.
4. KPK RI memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam program Stranas PK dan MCP Korsupgah atas komitmen dan kontribusi dalam pelaksanaan aksi pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (implementasi katalog lokal) Tahun 2021 – 2022. Dalam MCP Korsupgah, Pemerintah Provinsi Bali berhasil mencapai posisi 1 untuk Nasional dan khusus di area pengadaan barang/jasa sudah mencapai nilai 100 %.



5. Dalam penyelenggaraan fasilitasi kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan daerah sesuai ketentuan rata-rata sudah terselenggara dengan baik, seperti :
 - a. pengendalian keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi.
 - b. Pengendalian dan koordinasi BUMD dan BLUD.
 - c. Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Hanya saja, fungsi pembinaan terhadap UMKM masih belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan personil pelaksana teknis


4.2 Saran/Rekomendasi

Dari analisis rencana strategis, rata-rata indikator sudah bisa dicapai namun masih perlu ditingkatkan pada masa mendatang. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

- a. Melanjutkan upaya implementasi kematangan kelambagaan UKPBJ dapat di tingkatkan dari level 3 (proaktif) menuju level 4 (strategis) atau level 5 (unggul) sehingga Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali dapat menjadi *role model* atau sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan (PKP).
- b. Peningkatan 100 % *e-procurement* di perangkat daerah di lingkungan Pemerintah provinsi Bali melalui penyempurnaan tata kelola pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan komitmen *stakeholder* untuk melaksanakan 100 % *e-procurement* dalam pelaksanaan anggaran yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa, terutama bagi APBD Pemerintah Provinsi Bali.
- c. Melanjutkan proses pengelolaan katalog lokal untuk pengembangan dan pembinaan pelaku usaha lokal sehingga dapat ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa di daerah untuk beberapa komoditas dan varian yang memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam katalog lokal dengan berkoordinasi ke LKPP-RI.
- d. Meningkatkan pembinaan profesionalitas dan kompetensi pelaku pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- e. Meningkatkan peran dan fungsi dalam penyelenggaraan fasilitasi kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Bali, Januari 2024

	<p><u>Ditandatangani secara elektronik oleh :</u> Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian</p>
	<p>Drs. I Ketut Adiarsa, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19641231 198603 1 263</p>



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

